

MELIHAT RELASI DAERAH DAN NEGARA TAHUN 1950-AN DENGAN MEMBONGKAR NARASI BESAR SEJARAH

Dini Suryani

Resensi Buku

Judul Buku : Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an
Penulis : Sita Van Bemmelen dan Remco Reben (penyunting)
Penerbit : Yayasan Obor Indonesia
Tahun Terbit : 2011
Tebal : viii + 350 halaman
ISBN : 978-979-461-772-4

Abstract

Histories in the period of the 1950's are not much discussed in the realm of historical discourse in Indonesia. A decade in which this country was experiencing a very severe struggle, due to the separatist movements emerged in various parts of Indonesia, while the government had not been stable enough post-independence. It is time for us to leave the big narration of Indonesia history at the national for a moment, by looking more closely into the local level. How the fate of regions determined by the political realities of the 1950s and how the meeting point of national and local context? This article aims to review a book entitled "Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an" to answer those questions.

Keywords: History of 1950^s Indonesia, local, national

Abstrak

Sejarah dasawarsa 1950-an masih belum banyak didiskusikan dalam wacana historiografi Indonesia. Padahal dasawarsa tersebut Indonesia mengalami perjuangan berat karena banyaknya gerakan separatis yang muncul di berbagai daerah, sedangkan pemerintah pusat masih belum sepenuhnya stabil pascakemerdekaan. Oleh karena itu, penting bagi kita saat ini untuk sejenak meninggalkan narasi besar sejarah Indonesia dari kacamata Jakarta (pusat) dan melihat lebih dekat sejarah di tingkat lokal. Bagaimana nasib daerah ditentukan oleh kenyataan politik pada tahun 1950-an dan bagaimana titik temu antara konteks nasional dan lokal? Artikel ini bertujuan mengulas buku berjudul "Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an" untuk memperoleh jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Kata kunci: Sejarah Indonesia 1950-an, lokal, nasional

Pendahuluan

Reformasi 1998 merupakan simpang sejarah penting bagi bangsa Indonesia dengan adanya berbagai perubahan di segala aspek. Namun sesungguhnya, jarang disadari bahwa pengalaman bangsa Indonesia pascareformasi itu mirip dengan yang terjadi pada bangsa Indonesia pada tahun 1950-an. Ada beberapa isu penting yang sama diperdebatkan pada tahun 1950 dan saat ini. Isu pertama adalah mengenai otonomi daerah. Gagasan dan gerakan 'memekarkan' atau

'memerdekakan' diri yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia pada titik tertentu di kurun waktu tersebut serupa dengan tuntutan otonomi daerah yang muncul pascareformasi yang direspons dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, yang kerap kali muncul disertai dengan mobilisasi dan menguatnya sentimen etnis.

Isu kedua adalah mengenai demokrasi. Selain mengenai dorongan otonomi daerah, reformasi memunculkan kembali diskusi yang lebih hangat mengenai demokrasi. Pada

tahun 1950-an, muncul suatu istilah mengenai “demokrasi khas Indonesia” yang dipertahankan secara kuat sejak 1959 oleh Presiden Soekarno maupun Soeharto. Pada hari ini istilah demokrasi dipahami secara lebih umum, yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya demokrasi parlementer dan partai politik bekerja dalam kurun waktu 1950-an. Lebih jauh lagi, bagaimana organisasi berafiliasi dengan partai-partai politik dan menjalin hubungan dengan elite serta masyarakat. Di samping itu, reformasi memunculkan kembali keinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perjalanan sejarah sosial politik ekonomi di tingkat lokal. Berkaitan dengan itu, mirip dengan situasi saat ini, buku *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an* ini juga menawarkan peristiwa yang terkait tentang dinamika politik di level lokal.

Isu ketiga yang mengemuka pada saat reformasi adalah mengenai kebobrokan kinerja aparatur negara, dengan korupsi sebagai ciri khas yang marak dan paling utama. Sama seperti situasi saat ini, di tahun 1950-an birokrasi Indonesia juga dilanda korupsi yang merajalela oleh aparatur negara. Para perwira militer yang ditugaskan di daerah pada masa revolusi terlibat dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi, rupanya masih ingin melanjutkan aktivitasnya. Dalam hal ini, para perwira militer itu bekerja sama dengan pemerintahan sipil untuk mendapatkan “tambahan” penghasilan.

Kesamaan isu yang dimiliki di masa reformasi dan tahun 1950-an membuat kajian selama kurun waktu tersebut penting untuk disimak dan direnungkan kembali. Hal ini yang coba ditawarkan oleh buku *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an* yang disunting oleh Sita van Bemmelen dan Remco Raben.

Buku yang berisi tiga belas artikel ini mencoba mendalami cara-cara baru dalam memandang daerah pada tahun 1950-an, suatu periode yang dianggap sebagai ‘*terra incognita*’, periode yang tidak banyak dikaji dan disentuh. Dalam artikel pertama, kedua penyunting, Sita van Bemmelen dan Remco Raben menjelaskan urgensi bahwa tahun 1950-an adalah dekade penting di mana Indonesia diakui menjadi negara yang berdaulat. Dengan demikian, mereka

menganggap bahwa informasi yang cukup komprehensif mengenai apa yang dialami oleh bangsa dan negara Indonesia dalam kurun waktu tersebut sangat dibutuhkan. Karena itu, buku ini penting untuk diulas.

Tahun 1950-an: Tidak Sekadar Latar

Dalam buku ini, tahun 1950-an tidak menjadi sekadar latar belakang cerita mengenai periode lain, namun menjadi cerita utama. Senada dengan tulisan yang dikemukakan oleh Vicker di mana ia menekankan bahwa sejarah tahun 1950-an haruslah diletakkan dalam sebagai satu unit historis yang penting karena pada saat itulah Indonesia mengalami fase perjuangan terberat sebagai sebuah negara-bangsa.¹ Nordholt mendukung argumen ini, bahwa apa yang terjadi pada tahun 1950-an itu sangat menarik untuk dikaji dinamika dan kompleksitasnya secara partikular.

Secara sengaja buku ini menempatkan artikel klasik Ruth McVey yang berjudul “*The Case of Disappearing Decade*” yang ditulis pada tahun 1994 dan diterjemahkan menjadi “Kasus Tenggelamnya Sebuah Dasawarsa” (halaman 18–36). Artikel ini seakan menjadi penegas bahwa dasawarsa 1950-an perlu untuk dikaji secara khusus. Pada bagian awal, McVey mengungkapkan bahwa ada masa tahun 1950-an adalah masa di mana para cendekiawan dan sejarawan tidak dapat mengungkapkannya dengan jelas, penuh dengan isu-isu yang tidak bisa dipecahkan. Ia mengandaikan tahun 1950-an bagaikan Laut Sargaso yang bisa membuat para cendekiawan terdampar kebingungan.

Di masa Orde Baru, tahun 1950-an bahkan dipandang sebagai suatu masa yang penuh dengan hal-hal negatif. Periode parlementer yang dipenuhi dengan instabilitas politik, masa di mana demokrasi kepartaian mengalami kekacauan, dan kebijakan ekonomi yang gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga pembentakan yang bermunculan dari daerah-daerah. Pascakudeta 1 Oktober 1965 yang menimbulkan kejadian berdarah, secara sistematis Orde Baru

¹ Adrian Vickers, “Mengapa Tahun 1950-an Penting bagi Kajian Indonesia”, dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari (Eds.), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor, KITLV dan Pustaka Larasan, 2008), hlm. 67–78.

menciptakan 'budaya diam' terhadap segala kebijakan Orde Lama termasuk meninggalkan dan berhenti membicarakan segala "kekacauan" yang terjadi di tahun 1950-an serta menggantinya dengan era "ketertiban" dan "kemajuan". Artikel McVey juga menunjukkan bahwa Orde Baru berupaya untuk menghalangi penelitian tentang tahun 1950-an salah satunya karena ingin menutupi citra Soekarno yang masih populer dan memusatkan perhatian pada masa revolusi. Sejarawan asing secara tidak langsung juga tidak mempedulikan masa itu, meski dengan alasan yang berbeda-beda atau sama dengan sejarawan nasional. Pendapat tersebut juga diaminasi oleh Vickers.²

Selain menceritakan tentang minimnya minat kajian mengenai peristiwa yang terjadi pada tahun 1950-an, McVey memaparkan bahwa sesungguhnya dekade itu bukanlah dekade kegagalan. Pada dasawarsa itu McVey mengungkapkan bahwa sesungguhnya tidak ada gejala disintergrasi bangsa yang benar-benar berbahaya. Kecuali Maluku, tidak ada pemberontakan daerah yang berambisi memisahkan diri dari Indonesia, baik itu Aceh, Sumatra Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. McVey menganggap hal ini haruslah dilihat sebagai sesuatu yang positif bahwa Indonesia cukup kokoh sebagai masyarakat yang diimpikan (*imagined communities*), sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Benedict Anderson,³ bahwa wacana mengenai persekutuan ada dalam pikiran elite pribumi kepulauan ini, meskipun tidak pernah saling bertemu. McVey menganggap bahwa sejatinya perbedaan pusat-daerah pada waktu itu dapat ditengahi oleh demokrasi parlementer, meski enggan diakui.

McVey mengambil contoh yang paling menonjol, yaitu penolakan sebagian besar pemimpin Muslim untuk mengubah pemerintahan republik, meskipun mereka gagal dalam perjuangan mengubah sifat sekulernya menjadi negara Islam. Dari situ McVey percaya bahwa mereka beranggapan bahwa tujuan-tujuan Islam harus diperjuangkan melalui negara-kebangsaan Indonesia, bukan dengan menentangnya. Hal

ini sekaligus membuktikan bahwa sistem parlementer telah berjalan cukup baik dalam mengakomodasi perbedaan antara golongan sekuler dan agama.

Dalam artikelnya, Ruth McVey juga menekankan peran penting kaum elite nasional di tahun 1950-an itu. Mereka yang pertama-tama sadar atas kepentingan bersama yang hendak diusung. Ia memaparkan kedekatan antara kelompok elite bangsawan lama dengan pamong praja, di satu pihak dengan di pihak lainnya elite militer yang semakin kuat dan sebagian di antaranya adalah pendatang baru. Kaum elite yang juga menjadi fokus dari artikel McVey, seakan menjadi pedoman lain dalam artikel-artikel dalam buku ini.

Melihat Sejarah Daerah Lebih Dekat

Sejak awal, isu yang cukup menonjol dikemukakan dalam buku ini adalah tentang pendefinisian kembali daerah. Hal ini terlihat bahwa enam artikel membahas mengenai sejarah daerah dan isu-isu lain yang berkaitan dengan itu. Artikel pertama disajikan oleh Suprayitno dengan judul "Jalan Keluar yang Buntu: Federasi Sumatra sebagai Gagasan Kaum Terpojok" (halaman 64-105). Tulisan ini beranjak dari masa revolusi ketika Belanda membentuk sistem federal yang kembali didudukinya. Tengku Mansoer, wali Negara Sumatera Timur (NST), yang juga ketua Jong Sumatranen Bond (JSB) mencoba mencari dukungan bagi gagasannya untuk membentuk Federasi Sumatra dari kalangan elite di berbagai daerah di pulau tersebut, menjelang penyerahan kedaulatan, di akhir tahun 1948. Gagasan itu sekaligus menunjukkan adanya upaya untuk menjadikan identitas Sumatra sebagai *imagined community*. Gagasan itu sempat mendapat respons positif dari sejumlah tokoh politik termasuk kaum feodal di daerah yang dikuasai Belanda. Mereka merasa terancam dengan aksi gerilya yang muncul, khususnya di Tapanuli (Sumatra Utara) dan Sumatra Timur. Federasi Sumatra dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan kedudukan politik Indonesia agar segera memiliki kedaulatan sendiri. Untuk menegosiasikan gagasan tersebut diadakan Muktamar Sumatra I dan II.

Namun sayangnya, pasca-Muktamar I dan II muncul kesadaran bahwa gagasan itu tidak

² *Ibid.*, hlm. 68.

³ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, (New York: Verso, 1991)

mungkin terwujud. Paling tidak ada tiga hal yang menyebabkan keraguan itu. *Pertama*, kekompakan internal kurang karena tokoh daerah Sumatra yang mendukung republik tidak mendukung gagasan Federasi Sumatra atau identitas suku serta basis primordial lain. Hal ini sejalan dengan apa yang dituliskan oleh Anthony Reid, bahwa salah satu hal yang menyebabkan ditolaknya gagasan negara Sumatra adalah ide ini sungguh tidak menarik bagi orang Aceh atau orang Batak yang berjiwa bebas.⁴ Yang *kedua* sekaligus yang terpenting, para peserta menyadari lemahnya kekuatan mereka di masing-masing daerah atau kemungkinan besar akan kalah bila berhadapan dengan kekuatan Republik. *Ketiga*, mereka menyadari bahwa hubungan politik dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional kurang kuat.

Peristiwa Mukhtar Sumatra ini merupakan peristiwa yang hampir terlupakan. Meski begitu hal ini menunjukkan bahwa betapa masih terbukanya pilihan untuk pembangunan negara (*state building*) di Indonesia waktu itu. Dalam peristiwa ini kita bisa melihat pertarungan antara elite berpengaruh di daerah dengan kekuatan di pusat (Jakarta).

Pada artikel kedua yang bicara soal identitas daerah, Gusti Asnan membicarakan soal pemetaan wilayah yang menyinggung pula soal pembentukan identitas. Dalam artikel yang berjudul “Regionalisme, Historiografi, dan Pemetaan Wilayah” (halaman 106–132), Asnan menceritakan bahwa terdapat upaya kaum elite di Sumatra Barat dalam menyusun gagasan “Minangkabau Raya” yang mencakup wilayah Riau dan Jambi yang disatukan sejak 1948. Penyebaran ide tersebut dilakukan lewat buku sekolah yang menceritakan tentang sejarah lokal.

Sumatra Barat adalah salah satu wilayah yang sejak tahun 1950-an gigih memperjuangkan otonomi dan desentralisasi. Namun sayangnya, perjuangan itu tidak pernah direspons dengan baik oleh pemerintah pusat. Kekecewaan itu pada akhirnya diwujudkan dengan jalan pintas memproklamkan sebuah gerakan separatis yang disebut dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di tahun 1958. Gerakan

PRRI itu diatasi oleh pemerintah republik dengan sikap represif dan berhasil membuat PRRI terdesak. Provinsi Sumatra Tengah dipecah menjadi tiga provinsi, yaitu Sumatra Barat, Jambi, dan Riau. Pembersihan terhadap unsur-unsur PRRI di daerah inipun dilakukan, diiringi dengan “pencucian otak” warga daerah. Impian akan kebesaran Minangkabau Raya dibuang jauh-jauh. Sebagai bagian dari upaya itu, dilakukan pula penulisan ulang sejarah daerah dan penataan ulang materi pelajaran geografi serta pembuatan peta daerah.

Ketidakpuasan kaum elite Riau dan Jambi dipaparkan dalam artikel selanjutnya oleh Gusti Asnan yang berjudul “Berpisah untuk Bersatu: Dinamika Pemekaran Wilayah di Sumatra Tengah tahun 1950-an” (halaman 133–160). Ketidakpuasan atas dominasi elite Minangkabau dan “pemaksaan” atas gagasan Minangkabau Raya dilawan dengan gerakan dan tuntutan untuk memisahkan diri dari Minangkabau dan membentuk provinsi sendiri. Pemerintah pusat kemudian meluluskan permintaan itu pada tahun 1957.

Menutup tulisannya di artikel kedua ini, Asnan menunjukkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah jawaban dari permasalahan yang ada. Setelah dimekarkanpun Riau dan Jambi kembali menyuarkan ketidakpuasannya, yang sebelumnya kepada Bukittinggi, lalu kepada Jakarta. Pejabat pemimpin daerah yang *notabene* adalah orang luar dirasa sangat mengganggu karena mereka merasa kekayaan daerah dikuras dan dibawa ke Jakarta. Jika pemimpin Riau masih orang luar maka mereka mengancam untuk memisahkan diri dari NKRI. Ancaman yang ditanggapi pemerintah dengan terpilihnya Saleh Yazid, orang asli Riau sebagai gubernur pada Desember 1998. Tidak hanya dalam hal pemimpin saja, komposisi pembagian hasil bumi Riau, khususnya minyak bumi juga diatur sehingga bisa memberikan keuntungan pada daerah itu. Nyatanya, gerakan pemekaran wilayah tidak pernah berhenti. Di Riau sendiri, setelah tuntutan-tuntutan sebelumnya dipenuhi, gerakan yang serupa muncul dari Kepulauan Riau, yang kemudian melalui UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, keinginan tersebut diloloskan oleh pemerintah

⁴ Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*, (Jakarta: Yayasan Obor dan KITLV, 2011), hlm. 314.

pusat. Dari sini, Asnan menggarisbawahi bahwa gerakan pemekaran wilayah adalah gerakan yang terus akan terjadi di Indonesia. Baginya, di satu sisi gerakan tersebut adalah untuk memenuhi hasrat daerah, namun di sisi lain untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Setelah bicara soal pemekaran wilayah, pada bagian selanjutnya dalam buku ini, terdapat artikel mengenai pembentukan provinsi Kalimantan Tengah yang ditulis oleh Gerry van Klinken. Dalam artikelnya yang berjudul “Mengkolonisasi Borneo: Pembentukan Provinsi Dayak di Kalimantan” (halaman 161–194), Van Klinken menceritakan perjuangan kaum elite Dayak dalam mengusahakan pembentukan provinsi baru Kalimantan Tengah yang sebelumnya merupakan bagian dari Kalimantan Selatan. Van Klinken menceritakan bagaimana para orang-orang Dayak di Kuala Kapuas melakukan penyambutan yang luar biasa terhadap Soekarno yang berkunjung ke sana pada tahun 1957. Upaya itu ternyata berhasil membuat Soekarno memperlakukan wilayah tersebut dengan cukup istimewa, yaitu menjadikannya ibu kota Maphilindo (Malaysia, Filipina, dan Indonesia) yang ada dalam bayangannya serta membuat Rusia membangun jalan di sana.

Atas upaya orang-orang Dayak tersebut, Van Klinken menjelaskan bahwa terdapat dua pandangan yang muncul di dua pihak. Orang Jakarta memandang orang-orang “primitif” itu telah mempersembahkan suatu kesetiaan yang sangat besar, sedangkan orang setempat melihatnya sebagai pernyataan identitas setempat yang tidak dapat dipungkiri lagi. Meski begitu, Van Klinken menekankan bahwa hal ini harus dimaknai secara lebih baik di mana kedua persepsi yang sangat berbeda itu sejatinya bisa eksis di waktu yang bersamaan. Secara lebih luas, kita harus memahami interaksi antara etnisitas dan negara-bangsa. Dalam konteks ini etnisitas bukan sekadar fenomena budaya apalagi peninggalan, tetapi tersirat sebagai bagian dari proses pembentukan negara modern pada dekade 1950-an itu. Politik identitas etnis telah diizinkan keberadaannya di Republik ini. Bukan karena para pemberontak etnis yang menginginkan separatisme memaksakan kehendaknya, melainkan karena pemerintah pusat sendiri telah memilih merekrut para loyalis provinsi yang

terlihat seperti mencari perlindungan. Politik serupa muncul lagi pada tahun 2001, meskipun dalam wujud yang lain, yaitu penyingkiran orang non-Dayak. Dalam konflik etnis antara Dayak dan Madura yang pecah pasca-Orde Baru itu, sebuah organisasi militan Dayak menempati posisinya kembali termasuk milisi yang mempunyai koneksi dengan elite yang mengingatkan pada kelompok elite yang pada tahun-tahun sebelum provinsi ini dibentuk. Politik kedaerahan muncul kembali dan tampak dalam tindakan mengusir semua pendatang dari Madura.⁵

Setelah menyusuri sejarah daerah di Pulau Sumatra dan Kalimantan, buku ini mengajak kita untuk melihat perkembangan politik di Sulawesi sepanjang dasawarsa 1950-an. Esther Velthoen dalam artikel yang berjudul “Memetakan Sulawesi Tahun 1950-an” (halaman 196–216) menjabarkan proses integrasi Sulawesi Selatan (yang pada saat itu juga meliputi Sulawesi Tenggara) ke dalam negara kesatuan namun terhalang oleh konflik yang rumit antara gerakan Kahar Muzakkar—dengan gerakan Darul Islam (DI)—menghadapi pemerintah pusat.

Velthoen mengemukakan bahwa pada masa awal kemerdekaan, Sulawesi cukup sulit untuk dipetakan dan ditetapkan perbatasan daerah-daerahnya. Hal ini dikarenakan terus berubahnya konstelasi perbatasan ketika perjuangan untuk otonomi dipengaruhi oleh konteks nasional, regional, dan lokal. Konstelasi etnis dan historis kemudian tergeser oleh pengaruh panji-panji Islam modernis yang diusung oleh Kahar Muzakkar, dan konsep-konsep kunci yang dibawa oleh Republik Indonesia, yaitu modernitas, antikapitalisme, korporatisme serta kemerdekaan. Pengaruh-pengaruh yang datang dari kedua belah pihak ini sejatinya relatif baru dibanding pembagian kesukuan, kebahasaan, dan politik yang lebih lama, yang diwarisi dari masa prakolonial dan masa penjajahan. Velthoen menyoroti tiga wilayah di Sulawesi Selatan yang berada dalam pusaran konflik antara Kahar Muzakkar dan pemerintah pusat, yaitu Toraja, Semenanjung Tenggara, dan Buton.

⁵ Selanjutnya lihat Gerry van Klinken, “Pembentukan Aktor di Kalimantan Tengah”, dalam bukunya *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: KITLV 2007), hlm. 207–229.

Dalam kasus Toraja, perbedaan yang sudah lebih dahulu ada antara dataran tinggi Toraja dengan tetangganya, Bugis di dataran rendah, memiliki dimensi-dimensi politik dan keagamaan yang baru dalam konteks negara-bangsa yang baru. Identitas ke-Toraja-an menguat akibat tindakan-tindakan pengejaran yang dilakukan oleh Andi Sose, seorang perwira militer yang ditugaskan di wilayah itu, terhadap orang Kristen. Akhirnya orang Toraja cenderung memihak pada pemerintah pusat yang sekuler sebagai jaminan perlindungan terhadap lawan-lawan lokal mereka.

Sementara itu, yang terjadi di Semenanjung Tenggara terdapat perbedaan antara DI dan RI yang tampak mirip dengan perbedaan pada masa kolonial dan prakolonial antara suku Tomekongga dan suku Tolaki. Perjuangan Kahar Muzakkar melawan pemerintah pusat seketika menggantikan perjuangan merebut kemerdekaan. Tolaki awalnya berpihak pada NICA kemudian berpihak pada RI. Lalu, pasukan Djihad Konawe dari Tolaki membela penduduk Tolaki terhadap serangan-serangan, baik dari pihak DI maupun dari pasukan TNI. Kedua suku itupun akhirnya tidak memiliki posisi tawar yang kuat ketika pasukan Republik Indonesia berhasil mengalahkan pasukan Muzzakar. Alasannya adalah mereka dianggap mendukung gerakan DI dan memberontak pada pemerintah.

Buton adalah wilayah yang paling kurang terpengaruh oleh konflik yang terjadi di Sulawesi pada saat itu. Buton lebih memilih mengejar ambisinya lewat jalur politik dibanding membentuk milisi sendiri. Ambisi Buton adalah menegaskan kembali posisi sebagai pusat politik utama di Sulawesi bagian tenggara yang pada zaman Jepang diserahkan pada Kendari secara terpaksa. Buton harus mengklaim memiliki kesetiaan pada ideologi nasionalis karena sejatinya ia memiliki riwayat akrab dengan Belanda. Buton menginginkan pemerintah Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi pemerintah tradisional dan hukum adat Buton. Namun, usaha itu tidak membuahkan hasil karena tenggelam oleh implikasi yang ditimbulkan dari konflik bersenjata di Sulawesi Selatan. Ketika provinsi baru dibentuk, bukan seperti yang diinginkan oleh Laode Manarfa, putra Sultan Buton yang

memperjuangkan kepentingan ini, lantaran provinsi itu berpusat di Kendari, bukan di Buton. Kegagalan Buton akhirnya tidak banyak tersisa lagi dan pasca-kejadian pada tahun 1965, Buton justru menjadi salah satu daerah terbelakang.

Velthoen menutup tulisannya dengan menggambarkan situasi yang tampak di Sulawesi menjelang akhir 1950-an. Konstelasi baru di Sulawesi Tengah muncul dan pemberontakan bersenjata telah mati. Batasan provinsi menjadi lebih pasti. Tiga daerah yang dibahas Velthoen semuanya semakin berada dalam kontrol politik administratif Makassar. Meski begitu, Velthoen tetap menekankan bahwa ini harus dilihat lebih luas, bahwa dalam perjalanannya telah terjadi proses pergeseran kekuasaan dari Makassar ke Jakarta. Pemberontakan bersenjata ditindas, berkembangnya struktur negara yang lebih kuat, dan dimasukkannya secara pasti daerah-daerah dalam negara nasional yang tersentralisasi, untuk sementara bisa menetralkan persaingan antar daerah.

Artikel selanjutnya masih bicara mengenai suasana politik di Sulawesi pada tahun 1950-an. Kali ini muncul Diks Pasande yang bercerita mengenai “Politik Nasional dan Penguasa Lokal di Tana Toraja” (halaman 217–245). Diks Pasande menuliskan betapa beratnya perjuangan Tana Toraja untuk membebaskan diri dari dominasi Bugis yang direpresentasikan oleh Andi Sose, yang juga dari Luwu dan telah menjadikannya daerah taklukan di masa lalu. Masyarakat Tana Toraja sejatinya memiliki tujuan utama untuk menempatkan daerah Tana Toraja sejajar dengan daerah-daerah lain. Mencakup pula di dalamnya otonomi daerah Tana Toraja, pemerintah yang dipimpin oleh anak daerah serta militer yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab pada Jakarta. Kehadiran Andi Sose dipandang sebagai penghalang usaha itu, sedangkan Andi Sose adalah seorang perwira militer yang ditugaskan di Tana Toraja bermaksud untuk menguasai kekayaan alam di daerah tersebut.

Kekristenan muncul sebagai identitas baru perlawanan terhadap invasi Bugis secara terpaksa. Pilihan menggunakan kekristenan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari situasi masyarakat saat itu. Tidak semua pemuka masyarakat mendukung jika memakai simbol

kedaerahan dalam melawan Andi Sose karena beberapa memang ada yang berpihak pada Andi Sose. Pasande mengemukakan bahwa perkembangan di daerah ini sebenarnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah pusat untuk merangkul para gerilyawan lokal dengan mengintegrasikannya ke dalam tubuh TNI, yang waktu itu hanya berjumlah satu kompi. Berkaitan dengan hal itu maka identitas kekristenan kemudian juga menjadi pilihan. Gereja Toraja dalam hal ini tidak terang-terangan mendukung aksi perlawanan masyarakat Toraja melawan Andi Sose, meski juga tidak menghalanginya. Hal ini dikarenakan sebagian tokoh Parkindo ketika itu merupakan pengurus Gereja Toraja dan sebaliknya. Parkindo menjelang dan setelah Pemilu 1955 merupakan kekuatan politik yang cukup besar di wilayah itu.⁶ Parkindo nyatanya menjadi alat yang cukup efektif untuk melawan Andi Sose sehingga muncul kesan bahwa seakan-akan apa yang terjadi di dasawarsa 1950-an adalah peristiwa Islam-Kristen semata, sedangkan sebenarnya latar belakangnya jauh lebih kompleks daripada itu.

Diskusi Mengenai Demokrasi dan Korupsi

Selain bicara mengenai situasi daerah di tahun 1950-an, beberapa artikel dalam buku ini juga mendiskusikan soal demokrasi. Sebagaimana yang telah dituliskan di awal resensi ini, bahwa buku ini juga berusaha menggambarkan bagaimana sesungguhnya demokrasi parlementer dan kerja partai politik sepanjang tahun 1950-an. Termasuk bagaimana partai dan organisasi yang berafiliasi dengannya menjalin hubungan dengan elite juga masyarakat. Tulisan mengenai demokrasi yang dimaksud dalam buku ini mencoba menggambarkan bagaimana politik nasional masuk ke daerah dan menginfiltrasi dan mengkutubkan kehidupan komunitas daerah pada dasawarsa 1950-an. Kisah yang diungkapkan adalah tentang harapan besar yang ada di hati rakyat kecil untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik sesudah kemerdekaan Indonesia.

Dalam artikel yang ditulis oleh Agustinus Supriyono yang berjudul “Konflik Perburuhan Endemis di Pelabuhan Semarang pada Masa Revolusi dan Masa Republik” (halaman 246–268) menyajikan peristiwa kerusuhan buruh yang terjadi di kalangan buruh galangan kapal di Semarang. Kerusuhan itu dipimpin oleh buruh yang paling terampil, yaitu buruh tongkang. PKI yang pernah memiliki salah satu kekuatan di wilayah itu pada tahun 1920-an bangkit kembali melalui Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), yaitu serikat buruh yang berafiliasi pada partai tersebut.

Ketidakstabilan situasi nasional di tahun 1945–1949 (masa revolusi) utamanya pemerintah pendudukan Belanda di Kota Semarang dan belum pulihnya perusahaan bongkar-muat Belanda memberi kesempatan pada bangkitnya serikat buruh SOBSI, yang pada masa kolonial Belanda telah ditindas dan dibubarkan pada pendudukan Jepang. Aksi-aksi dan pemogokan dilakukan, tetapi tidak membawa pengaruh yang signifikan karena perusahaan-perusahaan Belanda hampir tidak dapat meneruskan kegiatannya dengan menguntungkan. Ketika perusahaan Belanda dinasionalisasi tahun 1957, gerakan buruh tidak dapat melawan penguasa sipil dan militer yang memadamkan kerusuhan buruh dengan todongan senjata, sementara PKI yang semula berada di belakang malah mengalihkan kegiatannya ke pedesaan.

Supriyono menutup tulisannya dengan menyatakan bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pengakuan dan penyerahan kedaulatan RI oleh Belanda 27 Desember 1949 serta nasionalisasi perusahaan Belanda 1957 bukanlah jembatan emas menuju peningkatan kesejahteraan ekonomis dan perbaikan perjanjian kerja bagi buruh seperti yang diharapkan. Bahkan buruh cenderung menjadi korban atau setidaknya alat dari kepentingan elite untuk mendapatkan sumber-sumber daya politik dan ekonomi.

Pada artikel selanjutnya, Mutiah Amini mencoba mengaitkan politisasi Kota Gede, sebuah kota kecil di Yogyakarta di mana PKI pernah memiliki sejumlah simpatisan di kalangan pengrajin perak di tahun 1920-an, mirip dengan yang terjadi di Semarang. Amini mengawali ar-

⁶ Parkindo tergolong partai menengah yang mendapat suara sebesar 10,6% di wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Lihat, Herbert Feith, *Pemilu 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hlm. 115.

tikelnya yang berjudul “Komunis di Kota Santri: Politik Lokal Kotagede pada 1950–1960-an” (halaman 269–294) dengan bercerita tentang partai politik yang aktif di panggung nasional pada 1950, yaitu Masyumi, PKI, PNI, dan NU yang memiliki cabang di Kotagede. Masyumi bahkan memiliki akar yang kuat di Kotagede karena organisasi keagamaan Muhammadiyah telah lebih dulu masuk. PKI yang telah dikenal sejak 1920-an juga mampu mengembangkan basis di wilayah itu dalam waktu yang relatif singkat. Sejak 1953, dua partai itu saling berebut massa. Di tahun 1955, keduanya melirik buruh kerajinan perak sebagai potensi utama Kotagede, yang jumlahnya cukup banyak. Dalam prosesnya, PKI cenderung bisa lebih menjaring massa, melalui SOBSI, organisasi buruhnya; sedangkan SBII, perserikatan buruh yang berafiliasi dengan Masyumi kurang dapat menandinginya.

Meskipun banyak buruh yang menjadi anggota SOBSI dan memihak pada PKI, namun relasi juragan dan buruh perak yang sudah terjalin lama tidak terpengaruh secara berarti. Para juragan yang mengorganisasi diri dalam Koperasi Pengusaha Perak (KP2) cukup memperhitungkan kebutuhan para buruh dan KP2 sendiri terdiri dari kelompok juragan yang berafiliasi di kedua partai, Masyumi dan PKI. Hubungan yang relatif harmonis itu bertahan dan tampak pada pemilu 1955, di mana keduanya mendapat suara realtif sama banyak, yaitu 40 persen.⁷

Pasca-gerakan pemberontakan yang bertubi-tubi di berbagai wilayah di Indonesia—seperti DI di Jawa Barat, PRRI di Sumatra Barat, dan Permesta di Sulawesi—Masyumi mendapatkan dampaknya, yaitu dilarang beraktivitas oleh pemerintah Indonesia sebagai partai politik. Hal itu disebabkan bahwa Masyumi dianggap terlibat dalam pemberontakan di berbagai daerah utamanya di Jawa Barat, Minangkabau, dan Sulawesi Selatan. Seiring dengan hilangnya dari arena politik di Kotagede, pengikutnya kemudian berpindah ke organisasi Muhammadiyah. Dalam tubuh KP2 sendiri juga tidak banyak pengaruhnya. Posisi ketua masih ditempati oleh

orang Masyumi hingga tahun 1962. KP2 sempat dipimpin oleh simpatisan komunis pada tahun 1962, tetapi jabatan lain masih dipegang oleh orang-orang Masyumi. Demikian pula, terkait dengan kebijakan perburuhan organisasi ini, tidak banyak yang berubah.

Tahun 1965, keseimbangan kekuatan politik dan kemasyarakatan di Kotagede runtuh. Kehancuran PKI pada tingkat nasional berpengaruh di pelosok Indonesia, termasuk Kotagede. KP2 yang beberapa pengurusnya terkait dengan PKI divakumkan, dan SOBSI dibubarkan. Lenyapnya komunis sebagai salah satu unsur dari dua elemen utama di Kotagede menjadikannya dikenal sebagai Kota Santri di kemudian hari.

Di samping persoalan demokrasi, buku ini juga menyinggung permasalahan birokrasi yang bobrok karena melakukan korupsi, isu yang juga banyak dibicarakan pada masa reformasi ini. Howard Dick dalam tulisannya yang berjudul “Ekonomi Indonesia pada Tahun 1950-an: Kurs Beraneka, Jaringan Bisnis serta Hubungan Pusat Daerah” (halaman 35–63). Dick menjelaskan bahwa korupsi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari birokrasi Indonesia dalam kurun waktu tersebut. Terdapat persaingan daerah melawan pusat dalam menguasai sumber-sumber ekonomi yang melimpah di luar Jawa (karet, minyak, kopra) dan menimbulkan konflik regional. Komandan-komandan militer di daerah yang telah terlibat sejak masa revolusi berniat melanjutkan aktivitas mereka untuk mendapatkan tambahan penghasilan karena negara yang masih belum stabil ini belum mampu menggaji mereka dengan layak. Pemerintah Pusat, yang memang sangat membutuhkan pemasukan menerapkan kebijakan fiskal berganda dan memungut berbagai macam pajak serta melakukan berbagai regulasi menyedot bagian yang lebih besar dari penghasilan ekspor-impor daerah.

Kebijakan tersebut memiliki efek penyimpangan dalam lapangan ekonomi dan pada bagian kedua dasawarsa 1950-an menjadi katalis gerakan daerah. Akibatnya, muncullah berbagai pasar gelap, pelanggaran terhadap berbagai peraturan resmi, dan praktik penyelundupan yang seakan dibiarkan oleh Angkatan Laut yang juga korup (*rent-seeking*). Pengusaha Tionghoa kemudian juga meninggalkan Indonesia karena

⁷ Untuk pemilihan Jawa Tengah muncul hasil yang cukup berbeda. Di Karesidenan Yogyakarta, partai yang meraih suara tertinggi adalah PKI (35%), disusul oleh PNI (30,6%), Masyumi (19,8%) dan NU (14,6%). Lihat, Herbert Feith, *Op.Cit.*, hlm. 123.

lahan bisnis dikuasai oleh penguasa militer dan sipil. Hal tersebut dirasa tidak menguntungkan bagi mereka yang akhirnya memilih Singapura dan Hong Kong sebagai tempat berbisnis yang baru. Ketika pemberontakan di daerah berhasil diakhiri, dan kekuatan ekonomi militer digulingkan, aktivitas bisnis para pengusaha Tionghoa itu dilanjutkan oleh para komandan dan pejabat sipil yang lebih tunduk pada Jakarta.

Penutup

Dua artikel terakhir dalam buku ini sepertinya dimaksudkan untuk menjadi pengikat dari tulisan bunga rampai yang telah disajikan sebelumnya. Artikel pertama ditulis oleh Remco Raben, salah satu penyunting buku, dan artikel kedua ditulis oleh Taufik Abdullah, sejarawan terkemuka Indonesia.

Remco Raben dalam artikelnya yang berjudul “Bangsa, Daerah, dan Ambiguitas Modernitas” (halaman 295–315) seakan menjadi benang merah dari apa yang dibahas dalam buku ini. Raben menekankan bahwa bangsa dan daerah tidak dapat dipertentangkan. Meski tuntutan otonomi dipandang sebagai suatu pemunculan kembali etnisitas oleh para politisi di tingkat nasional tahun 1950-an, dan juga selama Orde Baru, sejatinya tuntutan otonomi merefleksikan karakteristik utama masyarakat Indonesia. Daerah tidak sekadar mendupliaksi atau mengadopsi apa yang dibangun oleh pusat, tetapi daerah ternyata mengalami perdebatan tersendiri bagaimana masyarakat modern itu sesungguhnya dan apa saja kesenjangan antara negara dan bangsa. Raben berpendapat dengan melihat bangsa melalui kacamata daerah kenyataan tersebut dapat disibakkan. Dalam artikel terakhir di buku ini, Taufik Abdullah menyajikan sebuah tulisan mengenai “Regionalisme dan Sentralisme” (halaman 316–334) yang mengajak pembaca untuk menyadari bahwa permasalahan pendikotomian Jawa dan luar Jawa, baik dalam wacana maupun kebijakan yang diambil pemerintah masih bercampur-aduk dalam hasrat nasionalisme bahkan hingga sekarang.

Bagaimanapun, buku ini menyajikan rangkaian sejarah yang cukup komprehensif mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 1950-an, sebuah dekade yang sering diang-

gap menjadi periode yang sulit ditelusuri dalam simpang sejarah Republik Indonesia. Sebagai bunga rampai, artikel yang ada dalam buku ini cukup berkaitan satu dengan yang lain sehingga pembaca tetap bisa mengkerangkainya sebagai satu kesatuan yang utuh.

Artikel klasik McVey yang diletakkan di bagian awal, seakan merupakan payung yang sangat tepat untuk mengawali buku ini. Jika artikel McVey adalah payung maka artikel Raben bisa dikatakan sebagai benang merah dari keseluruhan artikel di buku ini. Bahwa tujuan membongkar narasi besar sejarah melalui peristiwa spesifik di daerah dan pengidentifikasian relasi pusat dan daerah pada dekade 1950-an disajikan secara baik dalam artikel ini.

Tidak hanya sampai di situ, refleksi atas apa yang terjadi pasca-Orde Baru dengan apa yang terjadi pada kurun waktu 1950-an di akhir artikel, menyadarkan kita bahwa penting untuk belajar dari sejarah karena sejarah bisa jadi berulang, meski dalam wajah yang berbeda. Buku ini menjadi sumbangan penting dan patut untuk dibaca oleh mahasiswa, akademisi, atau peminat sejarah karena sudah selayaknya peristiwa yang terjadi pada tahun 1950-an memiliki tempat yang sama dengan peristiwa lain yang terjadi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict. 1991. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. New York: Verso.
- Feith, Herbert. 1999. *Pemilu 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Nordholt, Henk Schulte. 2011. “Indonesia in the 1950s: Nation, Modernity, and Post-Colonial State”, dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*. Vol. 167, No.4 (2011), dalam <http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv>.
- Nordholt, Henk Sculte, Bambang Purwanto, Ratna Saptari (Eds.). 2008. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* Jakarta: Yayasan Obor, KITLV dan Pustaka Larasan.
- Reid, Anthony. 2011. *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor dan KITLV
- Van Klinken, Gerry. 2007. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: KITLV.